

LAPORAN HASIL KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN)

TAHUN 2025



KELURAHAN GUNUNG

LHKPN

TAHUN 2025

NAMA	JABATAN DI TAHUN 2025	KETERANGAN
A. ANDIKA EKA SAPUTRA	KASUBAG RUMAH TANGGA BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL	LURAH TMT 20 MEI 2026
FAHRUL HERTANTO	SEKRETARIS KELURAHAN GUNUNG	
DEDDY K.	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN KELURAHAN GUNUNG	
MUHAMAD ZULFIKAR	PELAKSANA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN RAKYAT TMT 20 MEI 2026
ARISTIKA WIDI RAHAYU	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN GUNUNG	



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Desember 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : A. ANDIKA EKA SAPUTRA
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA
3. NHK : 1032613

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **2.050.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 91 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 109 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **270.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **40.000.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp.** **----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp.** **98.833.885****F. HARTA LAINNYA** **Rp.** **----****Sub Total** **Rp.** **2.458.833.885****III. HUTANG** **Rp.** **527.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp.** **1.931.833.885**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : FAHRUL HERTANTO
2. Jabatan : SEKRETARIS KELURAHAN
3. NHK : 213864

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.607.940.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/52 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 609.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 998.940.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 212.500.000

1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
2. MOTOR, GESITS G1 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 18.500.000
3. MOBIL, KIA SONET Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 147.822.125

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 75.382.835

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.044.144.960

III. HUTANG Rp. 331.033.620

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.713.111.340

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Desember 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DEDDY KURNIAWAN
2. Jabatan : KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
3. NHK : 1000360

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **1.800.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 155 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 19 m2/19 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **365.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 290.000.000
2. MOTOR, VESPA SPRINT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **7.000.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp.** **----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp.** **697.947****F. HARTA LAINNYA** **Rp.** **----****Sub Total** **Rp.** **2.172.697.947****III. HUTANG** **Rp.** **4.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** **Rp.** **2.168.697.947**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMAD ZULFIKAR
2. Jabatan : PELAKSANA
3. NHK : 274818

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.775.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA BEKASI,
HASIL SENDIRI Rp. 875.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/41 m2 di KAB / KOTA BEKASI,
HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 91.000.000

1. MOTOR, HONDA VERZA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.
12.000.000
2. MOTOR, HONDA D1B02N12L2 / SEPEDA MOTOR Tahun 2019,
HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOTOR, HONDA F1C02N28LO A/T /SEPEDA MOTOR Tahun
2019, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. LAINNYA, TAYLOR 152-40 Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp.
50.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 33.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 332.281.772

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.231.781.772

III. HUTANG Rp. 2.069.743.983

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 162.037.789



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Desember 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARISTIKA WIDI RAHAYU**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT**
3. NHK : **1000115**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **1.835.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 56 m2/56 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/240 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/57 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **230.000.000**

1. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI PAJERO SPORT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOTOR, YAMAHA XMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----****D. SURAT BERHARGA** **Rp.** **----****E. KAS DAN SETARA KAS** **Rp.** **307.310.000****F. HARTA LAINNYA** **Rp.** **100.000.000****Sub Total** **Rp.** **2.472.310.000**



III. HUTANG

Rp. 721.601.133

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.750.708.867

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.